

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 untuk percepatan penurunan stunting demi tercapainya target nasional 14% pada tahun 2024. Namun, pada kenyataannya setelah ditetapkan peraturan tersebut masih belum bisa mencapai target 14% di tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses komunikasi dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting serta tantangan dan hambatannya. Teori yang digunakan adalah teori George Edward III yang berfokus pada indikator komunikasi, yang dianggap sangat relevan untuk menganalisis komunikasi kebijakan publik di Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik purposive sampling, serta uji validitas menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tasikmalaya telah berjalan cukup efektif melalui koordinasi lintas sektor dalam wadah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Proses transmisi pesan kebijakan berjalan baik dari tingkat pusat hingga desa melalui rapat koordinasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat. Kejelasan pesan tercermin dari penyampaian informasi yang disesuaikan dengan karakteristik sasaran dan dikomunikasikan melalui berbagai media seperti radio, media sosial, dan komunikasi interpersonal oleh tenaga kesehatan dan kader posyandu. Konsistensi kebijakan terlihat dari keseragaman arah pelaksanaan antar instansi serta evaluasi rutin yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga kesinambungan program. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting. Meskipun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang belum merata, serta kondisi geografis yang menantang, pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen kuat melalui sinergi lintas sektor dan inovasi komunikasi. Program unggulan seperti “Jas Dolis” menjadi contoh praktik baik yang mendukung keberlanjutan kebijakan dan mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya.

Kata Kunci: Komunikasi, Penurunan Stunting, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

The Tasikmalaya Regency Government has issued Regent Regulation Number 22 of 2023 to accelerate stunting reduction in order to achieve the national target of 14% in 2024. However, in reality, after the regulation was enacted, it still could not achieve the 14% target in 2024. This study aims to analyze the communication process in the implementation of the policy to accelerate stunting reduction and its challenges and obstacles. The theory used is the theory of George Edward III which focuses on communication indicators, which is considered very relevant to analyze public policy communication in Tasikmalaya Regency. The research method uses a qualitative method with a case study approach, through observation, interviews, and documentation with purposive sampling techniques, and validity testing using source triangulation. The study results indicate that communication in the implementation of the stunting reduction acceleration policy in Tasikmalaya Regency has been quite effective through cross-sector coordination within the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS). The policy message transmission process has been well-executed from the central to village levels through coordination meetings, outreach, and community education. The clarity of the message is reflected in the delivery of information tailored to the characteristics of the target and communicated through various media such as radio, social media, and interpersonal communication by health workers and integrated health post (Posyandu) cadres. Policy consistency is evident in the uniformity of implementation direction across agencies and regular evaluations conducted by the local government to maintain program continuity. The conclusion of this study indicates that communication is a critical factor in the successful implementation of the stunting reduction policy. Although there are still obstacles such as budget limitations, uneven distribution of human resources, and challenging geographic conditions, the local government has demonstrated strong commitment through cross-sector synergy and communication innovation. Flagship programs such as "Jas Dolis" serve as examples of good practices that support policy sustainability and accelerate stunting reduction in Tasikmalaya Regency.

Keywords: Communication, Stunting Reduction, Policy Implementation